



## PENGARUH TINGKAT PDRB, UPAH TENAGA KERJA, DAN *POLITICAL RISK* TERHADAP FDI DI PROVINSI BALI

Maria Carolina Moa Kopa<sup>1</sup> Anak Agung Bagus Putu Widanta<sup>2</sup>

### Article history:

Submitted: 2 November 2021

Revised: 14 November 2021

Accepted: 28 November 2021

### Keywords:

*Foreign Direct Investment;*

*Labor Wages;*

*Political Risk;*

*Bali Province;*

### Kata Kunci:

*Penanaman Modal Asing  
Langsung;*

*Upah Tenaga Kerja;*

*Risiko Politik;*

*Provinsi Bali;*

### Koresponding:

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Udayana, Bali,*

*Indonesia*

*Email:*

*mariacln26@gmail.com*

### Abstract

*This study aims to analyze the simultaneous and partial effect of the level of GRDP, labor wages, and political risk on Foreign Direct Investment (FDI) in Bali Province. The data used is secondary data with panel data analysis to analyze 9 districts/cities in Bali Province in the 2010-2019 period. The analysis technique used is the random effect model (REM) to analyze multiple linear regression, using the classical assumption test, as well as the beta regression coefficient test simultaneously and partially. The results of this study indicate that the GRDP level variable has a positive and significant effect on the level of Foreign Direct Investment (FDI). Meanwhile, labor wages and political risk variables have a negative and significant effect on the level of Foreign Direct Investment (FDI). Based on the results of the study, it is suggested to the Government to optimize the potential of each region in order to overcome the gaps between regions. In addition, the government needs to evaluate and tighten crime regulations so that the crime rate can be reduced to a minimum.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial dari tingkat PDRB, upah tenaga kerja, dan *political risk* terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan analisis panel data untuk menganalisis 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode 2010-2019. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu *random effect model* (REM) untuk menganalisis regresi linear berganda, menggunakan uji asumsi klasik, serta uji koefisien beta regresi secara simultan dan parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI). Sementara itu, variabel upah tenaga kerja dan *political risk* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI). Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan potensi daerah masing-masing agar bisa mengatasi kesenjangan antar daerah. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperketat peraturan tindak kriminal agar tingkat kriminalitas dapat ditekan seminimal mungkin.

## PENDAHULUAN

Investasi asing merupakan salah satu pendorong perekonomian dalam peningkatan produktivitas, pendapatan, serta pekerjaan bagi negara berkembang, karena pada umumnya negara berkembang belum dapat memenuhi kebutuhan dana negaranya sendiri. Investasi asing dapat dieproleh dari hutang luar negeri dan penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*). Secara konseptual, dana yang diperoleh dari penanaman modal asing lebih mengundungkan dibanding menambah hutang pada negara lain, hal ini dikarenakan tuan rumah tidak wajib mengembalikan hutangnya kepada pihak asing. Sukirno (2000) mendefinisikan investasi sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membeli keperluan produksi dan menambah barang modal. Investasi dapat dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dalam penelitian ini akan membahas terkait penanaman modal asing (PMA).

Dalam modal Dunning, terdapat 3(tiga) faktor yang mempengaruhi perkembangan FDI, yaitu Pertama, kondisi ekonomi suatu negara (yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, biaya tenaga kerja, *labor productivity*, rasio pembayaran hutang, defisit anggaran, konsumsi listrik, bunga kredit, nilai tukar efektif riil, dan ketidakstabilan nilai tukar). Kedua, tarif impor rata-rata yang berlaku dan perjanjian bilateral antara negara setempat dengan negara lain mencerminkan kebijakan pemerintah di negara tersebut. Ketiga, strategi perusahaan multinasional. Sebelum berinvestasi, perusahaan asing yang akan berinvestasi di suatu negara akan melihat risiko, lokasi, sumber daya, dan integrasi negara tersebut, kemudian faktor-faktor tersebut akan diwakili oleh risiko politik (Yati dkk, 2007). Setiap daerah berusaha menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya di daerah mereka, termasuk Provinsi Bali. Provinsi Bali yang memiliki daya tarik wisata memudahkan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Bali. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat ketidakstabilan nilai penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Provinsi Bali.

Para ekonom menyebutkan bahwa investasi berperan penting dalam perekonomian. FDI di Bali dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah tenaga kerja, serta *political risk*. Menurut Kappel (2003) modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena investasi asing yang masuk dapat menambah faktor-faktor produksi domestic. PDRB merupakan tolok ukur hasil pembangunan ekonomi suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nguyen *et al.*, (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan PDRB, mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDRB maka investasi juga akan meningkat.

Investasi asing langsung juga dapat diukur melalui upah tenaga kerja. Upah dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerjasama antara pengusaha dengan pekerja. Rendahnya upah tenaga kerja akan mendorong investasi asing sehingga akan menurunkan biaya produksi. Menurunnya biaya produksi akan meningkatkan laba perusahaan, sehingga harga barang akan menurun, serta meningkatkan permintaan terhadap barang yang diproduksi (Yogatama, 2011). Menurut teori lokasi yang dikemukakan oleh Moosa (2002), penyebab terjadinya FDI yaitu karena adanya faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan sumber daya alam. Salah satu bentuk perbedaan lokasi terkait faktor biaya produksi adalah keunggulan lokasi dengan upah yang rendah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bobby Kresna dan Yogi (2013) yang menemukan bahwa tingkat upah tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif terhadap FDI di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi investasi asing adalah tindak kejahatan pada suatu daerah. Semakin tinggi tindak kejahatan disuatu daerah maka investor akan enggan untuk menanamkan modalnya ke daerah tersebut. Hal ini karena investor menghindari untuk berinvestasi di daerah dengan risiko tinggi. Kemanan suatu daerah dapat dilihat pada jumlah peristiwa pidana yang tercatat. Menurut teori lokasi yang dikemukakan oleh Dunning (1988), perusahaan multinasional akan melakukan FDI ke suatu negara jika negara tersebut memiliki iklim usaha yang kondusif. Salah satu syarat agar terciptanya iklim usaha yang kondusif yaitu rendahnya *political risk* di negara tujuan tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Moosa (2005), Saleh dan Ikhsan (2019), dan Asiedu (2002) yang menemukan bahwa *political risk* memiliki pengaruh negatif terhadap FDI.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian terlebih dahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut: H1: Tingkat PDRB memiliki hubungan positif terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali. H2: Upah tenaga kerja dan *political risk* memiliki hubungan negatif terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali. H3: Tingkat PDRB, upah tenaga kerja, dan *political risk* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependen. Penelitian ini mengambil lokasi di 9 kabupaten di Provinsi Bali karena berdasarkan data Penanaman Modal Asing, tingkat Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali terjadi ketimpangan FDI antar kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah *Foreign Direct Investment* (FDI), PDRB, upah tenaga kerja, dan *political risk*. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode studi Pustaka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel untuk menganalisis sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode waktu 2010-2019, sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 90 pengamatan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan analisis regresi data panel. Terdapat tiga model yang digunakan untuk melakukan regresi data panel, menurut Basuki dan Prawoto (2016:276) yaitu *Pooled OLS/ Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : *Foreign Direct Investment* (FDI)
- $\beta_0$  : Intersep/konstanta
- $X_1$  : Tingkat PDRB
- $X_2$  : Upah tenaga kerja
- $X_3$  : *Political Risk*
- $\beta_1 \dots \beta_3$  : Slope/arah garis regresi
- e : Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model (*residual error*)

Sebelum dilakukan pengujian regresi, maka dilakukan uji asumsi klasik agar model regresi menjadi BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*). Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu, maka dapat dilakukan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Todaro (2000) mendefinisikan PDRB sebagai nilai total output yang dihasilkan oleh penduduk pada suatu daerah. Pertumbuhan PDRB merupakan suatu tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi daerah.

**Tabel 1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam milyar rupiah**

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	5666	6296	6973	7770	9020	10198	11168	12116	13143	14162
Tabanan	9325	10354	11470	12967	15066	16996	18630	20377	22139	23886
Badung	20849	23508	27201	31790	37273	42429	47208	52343	57799	62795
Gianyar	10903	12139	13605	15368	17909	20140	22113	24224	26488	28581
Klungkung	3580	3969	4398	4900	5676	6426	7112	7785	8463	9120
Bangli	2747	3048	3363	3779	4382	4946	5457	5977	6493	6999
Karangasem	6750	7443	8232	9293	10785	12233	13411	14598	15873	17107
Buleleng	13620	15190	16927	19144	22355	25170	27690	30319	32941	35509
Denpasar	20309	22664	25819	29389	34210	38424	42384	46836	51411	55676

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai 2019 PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar merupakan kabupaten/kota yang paling tinggi menghasilkan PDRB untuk Provinsi Bali. Dimana jumlah PDRB Kabupaten Badung mencapai 62.795 milyar rupiah dan Kota Denpasar mencapai 55.676 milyar rupiah pada tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang paling rendah menghasilkan PDRB yaitu sebesar 6.999 milyar rupiah di tahun yang sama. Menurut Buku "*Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli tahun 2011-2020*", rendahnya PDRB di Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa kontribusi setiap sektor terhadap perekonomian belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangli pada tahun 2016 berada pada kriteria kurang dengan nilai derajat desentralisasi fiskal sebesar 10,08 dan kembali menurun di tahun 2017 sebesar 9,57 dan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Ini

*Pengaruh Tingkat PDRB, Upah Tenaga Kerja, dan Political Risk Terhadap FDI di Provinsi Bali, Maria Carolina Moe Kopa dan Anak Agung Bagus Putu Widanta*

membuktikan bahwa PAD Kabupaten Bangli belum mampu menjadi sumber pendapatan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 2013, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Pada penelitian ini variabel upah tenaga kerja menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Bali. Dalam menetapkan besarnya sebuah upah disuatu wilayah, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah setempat.

**Tabel 2.**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dalam juta rupiah**

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	875	928	1.000	1.213	1.543	1.663	1.808	2.007	2.181	2.356
Tabanan	854	910	1.005	1.250	1.543	1.707	1.903	2.060	2.240	2.419
Badung	1.110	1.221	1.290	1.401	1.728	1.905	2.124	2.299	2.500	2.700
Gianyar	925	1.004	1.104	1.230	1.543	1.708	1.904	2.061	2.241	2.421
Klungkung	836	927	995	1.190	1.545	1.650	1.840	1.992	2.165	2.339
Bangli	830	893	970	1.182	1.543	1.622	1.809	1.958	2.128	2.299
Karangasem	875	954	1.040	1.195	1.543	1.700	1.896	2.052	2.180	2.355
Buleleng	830	895	975	1.200	1.543	1.650	1.840	1.992	2.165	2.339
Denpasar	1.100	1.192	1.259	1.358	1.657	1.800	2.007	2.173	2.363	2.553

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 2 selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2019, UMK Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. UMK tertinggi dipegang oleh Kabupaten Badung sebesar Rp. 2.700.300, lalu disusul oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar yaitu sebesar Rp. 2.553.000 dan Rp. 2.421.000 di tahun 2019. sedangkan Kabupaten Bangli memegang UMK terendah di Provinsi Bali yang hanya sebesar Rp. 2.299.150 di tahun 2019.

*Political risk* adalah risiko yang timbul akibat ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan struktur pemerintahan, dan perilaku sosial yang berdampak negatif bagi suatu wilayah. Hubungan antara *political risk* dan kekerasan politik dijelaskan dalam jurnal Rubini (2014) yang berjudul “*AON Political Risk Map: Methodology Document*”, *political risk* diukur ke dalam 6 bagian risiko dengan metode RGE, salah satunya yaitu *Political Violence* atau kekerasan politik. Moosa (2002) juga memaparkan bahwa kekerasan politik seperti tindak kriminal, kerusuhan, dan perang saudara merupakan sumber-sumber yang dapat memicu terjadinya *political risk*. Maka dari itu variabel *political risk* pada penelitian ini diukur dengan indikator tindak kriminal.

Jumlah tindak pidana dalam Tabel 3 merupakan tindak kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian dan tindak kriminal yang pelakunya tertangkap oleh polisi sekalipun tanpa pelaporan. Jumlah Tindak Pidana yang dilaporkan meningkat di tahun 2019 sebanyak 3.366 kasus. Apabila dilihat menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019, Kota Denpasar merupakan Kabupaten/Kota yang paling banyak dilaporkan mengenai kasus tindak pidana yaitu sebanyak 1.542 kasus, disusul Kabupaten Badung sebanyak 545 kasus, dan Kabupaten Buleleng sebanyak 320 kasus. Dapat diasumsikan semakin sedikit jumlah peristiwa pidana yang tercatat semakin baik kondisi keamanan di wilayah tersebut.

**Tabel 3.**  
**Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada Tahun 2010-2019**

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	1173	555	555	500	429	488	374	188	160	157
Tabanan	408	413	553	442	427	420	292	197	183	207
Badung	667	644	627	788	540	380	488	409	437	545
Gianyar	562	816	897	795	840	840	754	373	313	243
Klungkung	255	298	429	398	408	299	231	172	126	130
Bangli	212	226	290	269	206	294	208	126	97	96
Karangasem	452	471	449	409	368	268	279	146	123	126
Buleleng	858	1158	1315	927	843	128	617	344	363	320
Denpasar	2420	2812	2851	3052	2559	3559	2231	1399	1156	1542

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

**Tabel 4.**  
**Foreign Direct Investment (FDI) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam juta rupiah**

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jembrana	0,0	11	2	1	8	0	2.413	2	0	6
Tabanan	239	26	54	332	646	267	901	129	1	196
Badung	2.626	1.430	4.082	3.021	959	3.362	107	4.899	252	4.382
Gianyar	2	80	180	96	112	151	0	186	7	586
Klungkung	0	1	2	5	6	30	151	100	15	88
Bangli	2	2	0,1	0,1	1	0	0	0	0	1
Karangasem	1.239	590	50	24	60	76	71	171	272	153
Buleleng	17	2.059	71	60	3.100	1.273	207	3	1.759	231
Denpasar	85	188	38	95	184	1.703	139	700	33	748

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan FDI kabupaten/kota di Provinsi Bali bervariasi. FDI Kabupaten Badung memiliki nominal yang paling tinggi yaitu sebesar 4.382,40 juta pada tahun 2019 dan Kabupaten Bangli memiliki nominal yang paling rendah yaitu 0,89 juta. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang menjadi daerah konsentrasi dalam mengembangkan pariwisata di Provinsi Bali secara besar-besaran (*mass tourism*) yang telah dilakukan sejak akhir periode pertama kepemimpinan Prof. Dr. I. B. Mantra (1978-1983) yang menyebabkan Kabupaten Badung menjadi rebutan para investor karena dipandang berpotensi untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Bali sampai saat ini. Sedangkan Kabupaten Bangli kurang diminati oleh investor hal tersebut dikarenakan kurang memadainya infrastruktur serta kurangnya penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan yang akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Badung (Gede Raka, 2020).

**Tabel 5.**  
**Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.782968	(8,78)	0.0009
Cross-section Chi-square	29.507537	8	0.0003

Sumber: Hasil olah data di Eviews 10, 2021

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa untuk memperoleh nilai  $F_{tabel}$ , dapat dilihat pada tabel F derajat kebebasan 1 = 8, dan derajat 2 = 78, dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Maka diperoleh nilai  $F_{tabel} = 2.06$ . Oleh karena nilai probability  $F < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak, maka dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan model fixed effect atau model random effect.

**Tabel 6.**  
**Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.012994	3	0.0726

Sumber: Hasil olah data di Eviews 10, 2021

Oleh karena nilai probability Chi-Square  $> 0,05$  artinya  $H_0$  diterima, maka model Random Effect. Dimana model Random Effect dipakai sebagai model data panel dalam penelitian ini.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	807.5285	331.3065	2.437406	0.0169
X1	0.055165	0.009336	5.908601	0.0000
X2	-0.657987	0.222327	-2.959549	0.0040
X3	-0.382872	0.158140	-2.421091	0.0176

Sumber: Hasil olah data di Eviews 10, 2021

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, didapat persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 807.5285 + 0.055165 X_1 - 0.657987 X_2 - 0.382872 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut Nilai konstanta sebesar 807,5285 memiliki arti bahwa apabila tingkat PDRB, upah tenaga kerja, dan *political risk* konstan maka FDI akan meningkat sebesar 807,5285 juta rupiah. Nilai koefisien regresi variabel PDRB ( $X_1$ ) terhadap FDI (Y) sebesar 0,055165 memiliki arti bahwa apabila PDRB meningkat sebesar 1 milyar rupiah maka FDI akan meningkat sebesar 0,055165 milyar rupiah dengan asumsi variabel upah tenaga kerja dan *political risk* konstan. Nilai koefisien regresi variabel upah tenaga kerja ( $X_2$ ) terhadap FDI (Y) sebesar 0,657987 memiliki arti bahwa apabila upah tenaga kerja meningkat sebesar 1 juta rupiah maka FDI akan menurun sebesar 0,657987 juta rupiah dengan asumsi variabel PDRB dan *political risk* konstan. Nilai koefisien regresi variabel *political risk* ( $X_3$ ) terhadap FDI (Y) sebesar 0,382872

memiliki arti bahwa apabila *political risk* meningkat sebesar 1 kasus maka FDI akan menurun sebesar 0,382872 juta rupiah dengan asumsi PDRB dan upah tenaga kerja konstan

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $F_{hitung} = 10.36 > F_{tabel} = 2.06$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat PDRB, upah tenaga kerja, dan *political risk* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai  $t_{hitung} 5,908 > 1,662 t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti tingkat PDRB berpengaruh positif dan secara parsial signifikan terhadap variabel *Foreign Direct Investment* (FDI). Artinya ketika tingkat PDRB mengalami peningkatan, maka tingkat FDI juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini didukung oleh studi empiris dari penelitian yang dibuat oleh Nguyen (2012), dan juga Siti S.U dan Arif Rakhman, dengan hasil bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Provinsi Bali. Menurut pakar ekonomi yaitu Rolf Kappel (2003) menagatakan bahwa modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena investasi asing yang masuk dapat menambah faktor-faktor produksi domestik. Dimana PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi disuatu daerah. Selain itu, yang menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan pembangunan ekonomi disuatu daerah yaitu perkembangan tingkat pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai  $t_{hitung} -2,959 < -1,662 t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti upah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *Foreign Direct Investment* (FDI). Artinya ketika upah tenaga kerja mengalami kenaikan, maka tingkat FDI akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini didukung oleh studi empiris dari penelitian sebelumnya yaitu Bobby Kresna dan Yogi (2013) yang menyebutkan bahwa upah tenaga kerja secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI di Indonesia tahun 1990-2012. Upah tenaga kerja yang meningkat akan menambah biaya produksi, sehingga biaya untuk melakukan proses produksi di dalam suatu perusahaan/ wilayah tersebut relatif menjadi lebih mahal. Begitu pula sebaliknya, dengan biaya produksi yang lebih rendah maka dapat meningkatkan laba dan dapat menekan biaya produksi perusahaan. Oleh karena itu, harga produk akan lebih murah dan nantinya akan menaikkan jumlah permintaan di pasar.

Teori lokasi yang dijelaskan oleh Dunning (1988), Moosa (2002), dan Wahyuddin (2004) menyebutkan bahwa tingkat upah negara tuan rumah menjadi faktor penting dalam menentukan masuknya investasi asing langsung ke suatu wilayah. Dalam teori ini, penyebab terjadinya FDI yaitu karna adanya faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan sumber daya alam. Imobilitas ini menyebabkan perbedaan lokasi yang berkaitan dengan biaya produksi. Salah satu bentuk perbedaan lokasi terkait faktor biaya produksi adalah keunggulan lokasi dengan upah yang rendah.

Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai  $t_{hitung} -2,421 < -1,662 t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti *political risk* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *Foreign Direct Investment* (FDI). Artinya ketika tingkat *political risk* mengalami kenaikan, maka tingkat FDI akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini didukung oleh studi empiris dari penelitian sebelumnya yaitu oleh Moosa (2005), Saleh dan Ikhsan (2019), dan Asiedu (2002) yang menyebutkan bahwa *political risk* memiliki pengaruh negatif terhadap FDI. Teori lokasi yang dikemukakan oleh Dunning (1988), Mossa (2005), dan Wahyuddin (2004) menyebutkan bahwa perusahaan multinasional akan enggan untuk menanamkan modalnya kepada wilayah dengan *political risk* yang tinggi. Perusahaan multinasional akan melakukan FDI ke suatu negara jika wilayah tersebut memiliki iklim usaha yang kondusif.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel tingkat PDRB, upah tenaga kerja, dan *political risk* berpengaruh terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali. Koefisien variabel tingkat PDRB bertanda positif artinya semakin tinggi PDRB maka akan meningkatkan jumlah FDI yang masuk ke Provinsi Bali. Secara parsial upah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali. Koefisien variabel tingkat upah tenaga kerja bertanda negatif artinya semakin tinggi upah tenaga kerja maka akan menurunkan jumlah FDI yang masuk ke Provinsi Bali. Secara parsial *political risk* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) di Provinsi Bali. Koefisien variabel tingkat *political risk* dengan indikator tindak pidana bertanda negatif artinya semakin tinggi *political risk* maka akan menurunkan jumlah FDI yang masuk ke Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut. Bagi pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau referensi untuk lebih meningkatkan pelayanan serta kebijakan jika ingin menarik investor luar ke wilayah Provinsi Bali. Sesuai hasil penelitian bahwa pemerintah perlu mengevaluasi dan memperketat peraturan tindak kriminal agar tingkat kriminalitas dapat ditekan seminimal mungkin. Tingkat PDRB merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Jika pertumbuhan ekonomi hanya terfokus pada satu wilayah, maka akan tercipta kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah antar daerah dalam hal ini para Bupati harus mampu mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing.

## REFERENSI

- Asiedu, Eliza beth. 2002. On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different?. *World Development*, 30 (1): 107-119.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. 2016. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Bobby Kresna Dewata dan I. W. Yogi Swara . 2013. Pengaruh Total Ekspor, Libor, dan Upah Tenaga Kerja Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8): 350–358
- Dunning, John H. 1988. *Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach*. London: Macmillan
- Kappel, Rolf. 2003. Openness, Institutions and Policies: Determinants of Globalization and Economic Growth in Developing Countries. *The Pakistan Development Review* 42:4
- Moosa, Imad A. dan Cardak, B.A. 2005. The Determinants of Foreign Direct Investment: An Extreme Bounds Analysis, *Journal of Multinational Financial Management*
- Moosa, Imad A. 2002. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice*. Basingstroke: Palgrave
- Nguyen Dinh Chien dan Kezhong Zhang. 2012. FDI of Vietnam; Two-Way Linkages between FDI and GDP, Competition among Provinces and Effects of Laws. *Journal of Bussiness*. Hue University, Vietnam
- Raka, Gede A.A, Suyatna Yasa, Suacana, dan Yaya Sa witri. 2020. *Dinamika Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2011-2020*. Bali: Cakra Media Utama
- Saleh, M. Hasbi and Ikhsan, Muhammad. 2019. *Keterkaitan international financial reporting standards dan country risk atas foreign direct investment*. Other. STEI. (Unpublished)
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan Modern*. Jakarta: PT. Rajawali Gra findo Persada
- Todaro, M.P. 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.
- Wahyuddin, Muhammad. 2004. *Dinamika Spatial Manufaktur Berorientasi Ekspor Indonesia, 1990-1999*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta

- 
- Yati Kurniati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri. 2007. Determinan FDI: Faktor-faktor yang Menentukan Investasi Langsung. *Bank Indonesia Working Paper*
- Yogatama Pande Mudara, I Made. 2011. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja, dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia (1990-2009). *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro